

**ANALISIS YURIDIS HAMBATAN PELAKSANAAN PUTUSAN  
KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN  
2004**

**NOVALDI / D 101 09 050**

**ABSTRAK**

*Penulisan ini membahas dan menganalisis faktor-faktor penyebab tidak Sempurnanya pelaksanaan eksekusi jaminan oleh kurator, serta berbagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.*

*Metode yang di gunakan dalam penulisan ini adalah metode yang bersifat yuridis normatif yaitu menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan putusan kepalitan dan penundaan pembayaran sejak pengadilan niaga dibentuk hingga saat ini tidak banyak penyelesaian keputusan Pengadilan Pernyataan Pailit secara tuntas yaitu, sampai diumumkannya daftar pembagian harta (obyek) benda yang akan di eksekusi tersebut.*

*Kendala yang dijumpai kebanyakan dari debitur yang tidak Koperatif dan kurator kurang aktif serta kurang memahami ketentuan yang terkait dengan berbagai macam peraturan perundan-undangan yang dapat memperkuat alasan dalam eksekusi harta perusahaan yang dinyatakan Pailit atau penundaan pembayaran.*

*Adanya perbedaan penafsiran tentang ketentuan undang-undang antara Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung atau antar Hakim Agung yang menambah panjang jangka waktu penyelesaian putusan pailit apalagi jika menghadapi masalah yang belum ada ketentuan yang mengatur penyelesaian Sengketa Kepailitan seperti insolvensi lintas batas.*

***Kata Kunci : hambatan pelaksanaan putusan kepailitan***

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 lalu telah mengacaukan seluruh sendi-sendi perekonomian Indonesia dan akibatnya sampai sekarang ini masih terasa. Krisis moneter itu diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat (AS). Hal itu telah mengakibatkan utang-utang para pengusaha Indonesia dalam valuta asing terutama terhadap para kreditur luar negeri menjadi membengkak luar biasa sehingga debitur menjadi tidak mampu membayar utang-utangnya. Disamping itu, kredit macet pada perbankan dalam negeri juga makin membumbung tinggi secara luar biasa (sebelum krisis moneter perbankan Indonesia memang juga telah menghadapi masalah

kredit bermasalah atau *Non-Performing Loans* yang memprihatinkan), yaitu sebagai akibat terpuruknya sektor ril karena krisis moneter tersebut.<sup>1</sup>

Untuk mengatasi masalah-masalah yang akan timbul dari krisis moneter tersebut, terutama dalam penyelesaian masalah utang antara debitur dan kreditur, pemerintah pada tanggal 22 April 1998 menetapkan Peraturan Pemerintah (Perpu) Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan (Lembaran Negara RI Tahun 1998 No. 87 Undang-Undang Kepailitan).

---

<sup>1</sup>Remy Sutan Sjahdeni, *Hukum Kepailitan (Memahami faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998)*, Pustaka Utama Graffiti, jakarta, 2002, hlm., 23

Peraturan pemerintah (Perpu) tersebut kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjadi Undang-undang yaitu ditetapkan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998. Selanjutnya dirubah lagi dengan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam proses kepailitan maka setelah jatuhnya putusan kepailitan ada dua organ yang sangat berperan aktif dalam pelaksanaannya, yaitu Hakim Pengawas yang bertugas mengawasi Kurator yang bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 disebutkan bahwa Pengadilan Niaga merupakan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan permohonan.

Pengertian mengenai kurator disebutkan dalam Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 dalam Pasal 1 angka 5 dikatakan bahwa kurator adalah balai harta peninggalan atau orang yang akan melakukan segala sesuatu yang berkenaan dengan *faillissements* ini, yang mengambil tempat dari pihak debitur yang telah dinyatakan pailit untuk melakukan tindakan-tindakan hukum berkenaan dengan preservasi (pemeliharaan) asetnya yang sedapat mungkin dibagi kepada semua para kreditur secara adil. Selanjutnya diangkat oleh pengadilan serta dibawah pengawasan hakim pengawas sesuai undang-undang ini.

Dalam proses kepailitan sering ditemui hambatan-hambatan yang menghalangi jalannya proses kepailitan sampai dengan pelaksanaan putusan kepailitan. Hambatan ini bisa menimbulkan ketidak pastian hukum karena dengan lambatnya pelaksanaan putusan kepailitan maka dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kepailitan tersebut, padahal Undang-undang No. 37 tahun 2004 ini menganut asas adil (memperhatikan kepentingan secara seimbang antara kreditur dan debitur), cepat (dibatasi jangka waktu penyelesaian perkara baik ditingkat pertama, kasasi, maupun peninjauan kembali), efektif (tanpa putusan mempunyai kekuatan pasti, putusan sudah dapat dilaksanakan).

Hambatan-hambatan itu biasanya datang dari pihak debitur yang beritikad buruk atau berasal dari debitur yang beritikad tidak baik atau yang tidak mempunyai keinginan untuk melunasi utang-utangnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, maka penulis akan membahas mengenai masalah :

1. Faktor-faktor apa yang dapat menjadi hambatan sehingga putusan kepailitan tidak dapat dilaksanakan?
2. Usaha apa yang perlu dilaksanakan oleh kurator-kurator untuk mencegah timbulnya hambatan-hambatan tersebut?

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan putusan kepailitan**

#### **a) Debitur Tidak Koperatif dan Kurator Kurang Profesional**

Pelaksanaan putusan dalam Kepailitan sangat tergantung pada itikad baik dari Debitur. Jika Debitur tidak mempunyai itikad baik dan tidak mau menghargai putusan kepailitan serta kurang profesionalnya kurator yang menjadi pelaksana putusan pailit, maka jangan diharap pelaksanaan putusan pailit akan terlaksana dengan tuntas.

Kurator pada saat pengurusan dan pemberesan tidak menggunakan upaya-upaya yang semestinya dapat ditempuhnya sehingga kurator yang demikian dapat dinyatakan kurang profesional. Dalam pelaksanaan putusan acara perdata sering terjadi bahwa putusan dapat dilaksanakan dengan paksa dan Pengadilan Negeri dapat meminta bantuan POLRI atau ABRI untuk menjaga ketertiban dan keamanan ditempat dimana putusan dilaksanakan.

Hukum acara perdata yang berlaku tetap berlaku pada Pengadilan Niaga kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Ini berarti pelaksanaan putusan kepailitan dapat juga dilaksanakan sesuai acara perdata yang berlaku yaitu HIR dan untuk itu Kurator dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Niaga agar dalam melaksanakan putusan

tersebut diikuti sertakan POLRI atau ABRI untuk mengamankan, sehingga Kurator dapat melakukan pengamanan harta pailit dan mencatatnya.

Selain dari pada itu menurut Jerry Hoff dan Munir Fuady, kepailitan merupakan suatu sita secara umum atas seluruh harta debitur. Sitaan umum dalam kepailitan tersebut mempunyai kedudukan yang istimewa karena segala sita yang telah ditaruh atau diletakkan menjadi hapus tanggal putusan pernyataan pailit maka secara otomatis harta kekayaan debitur dibawah sitaan umum dan semua sita baik sita *conservatoir*. Sita *revindicatoir* maupun sita *eksekutorial* akan hapus bahkan kalau pun sudah ada pengumuman lelang akan berhenti kecuali jika hari pelelangan tersebut sudah ditetapkan.<sup>2</sup>

Jika harta pailit sudah berada dalam sitaan umum sejak putusan pernyataan pailit, maka sebagaimana sita lainnya berlaku ketentuan Pasal 197 ayat 9 dan Pasal 199 HIR yaitu barang-barang yang disita diberikan pada orang yang disita atau dapat dibawa ketempat yang patut dan pada pihak yang disita tidak boleh lagi memindahkan barang yang disita kepada orang lain, memberatkan atau mempersewakannya<sup>3</sup>

Walaupun ketentuan yang demikian tidak ditentukan dengan tegas dalam Undang-Undang Kepailitan tetapi ketentuan demikian merupakan makna yang dinyatakan pailit, maka si berhutang demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan, begitu pula hak untuk mengurusnya, terhitung mulai hari diucapkannya pernyataan pailit. Dengan demikian jika yang disita memindahtangankan barang-barang yang disita dapat diberlakukan Pasal 231 KUHPidana tersebut berbunyi :

Ayat 1 : “Barang siapa dengan sengaja melepaskan barang yang telah disita menurut peraturan undang-undang atau melepaskan dari simpanan atas perintah hukum, atau menyembunyikan barang itu, sedang diketahuinya bahwa barang itu dilepaskan dari sitaan atau simpanan itu, dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun”.

Ayat 2 : “Dengan hukuman itu juga dihukum barang siapa dengan sengaja membinasakan merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi suatu barang yang disita menurut peraturan undang-undang”.

Ayat 3 : “Si Penyimpan yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan salah satu perbuatan ini, atau membantu orang yang melakukan kejahatan ini, dihukum penjara setinggi-tingginya 5 tahun”.

Sebagaimana yang dikemukakan di atas debitur-debitur tersebut tanpa melalui Kurator telah membayar utangnya kepada para kreditur pemohon maka dengan demikian ketentuan tersebut diatas dapat diterapkan kepada para debitur.<sup>4</sup>

Si pailit wajib menghadap Hakim Pengawas atau Kurator manakala mereka dipanggil. Bahkan dalam Pasal 115 UUPK debitur pailit harus menghadap sendiri dirapat pencocokan piutang. Dari berita acara rapat ternyata debitur-debitur tidak pernah hadir sampai saat ini. Oleh karena itu dalam kasus ini atas permintaan antara lain Kurator setelah mendengar Hakim Pengawas maka Pengadilan Niaga dapat memerintahkan agar si pailit disandera atau ditahan baik dalam penjara maupun di rumah si pailit sendiri dibawah pengawasan pejabat dari kekuasaan umum. Mengenai pelaksanaan sandera ini hingga saat ini masih belum pernah dilakukan oleh Pengadilan Niaga walaupun telah pernah dimohonkan.

---

<sup>2</sup>Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan Indonesia*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2000, hlm., 96.

<sup>3</sup>Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya bakti, Bandung, 1998, hlm., 112.

---

<sup>4</sup>Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Undang-Undang)*, CV. Mandar maju, Bandung, 1994, hlm., 79.

**b) Debitur Pailit yang Tidak Cukup mempunyai Harta Pailit**

Pasal 1131 KUHPerdara menyatakan segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perorangan. Dengan demikian berarti harta benda seseorang menjadi pembayar atau pelunasan utang-utang yang timbul karena hubungan perikatan atau persetujuan yang telah dibuat. Ini berarti bahwa utang-utang seseorang yang timbul karena perikatan atau persetujuan yang dibuat, semestinya dapat dilunasi dengan harta-harta yang telah dimilikinya.

Pasal 1132 KUHPerdara menyatakan bahwa benda-benda itu dimaksudkan sebagai jaminan bagi para krediturnya bersama-sama, dan hasil penjualan atas benda-benda itu akan dibagikan diantara mereka secara berimbang, menurut imbalan/perbandingan tagihan-tagihan mereka, kecuali bilamana mereka atau para kreditur terdapat alasan-alasan pendahuluan yang sah. Akan tetapi ternyata tidak semua dapat dipenuhi dengan harta kekayaan yang ada bahkan tidak jarang harta kekayaan seseorang itu tidak ada sama sekali.

Kurator telah melaksanakan tugasnya akan tetapi debitur pailit tidak mempunyai harta pailit dan dalam rapat kreditur kurator melaporkan pada Hakim Pengawas, akan tetapi dalam rapat verifikasi, kurator tidak melaporkan tentang keadaan pembukuan debitur, apa sebab sehingga modal perusahaan sampai habis dan dikemanakan aset perusahaan. Hakim Pengawas kemudian melaporkan dan mengusulkan pada Majelis Hakim agar perkara kepailitan dicabut berdasarkan Pasal 15 UUPK. Majelis Hakim setelah memeriksa usulan Hakim Pengawas tersebut telah mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut. Pencabutan perkara tersebut berarti perusahaan hidup kembali seperti tidak terjadi kepailitan dan perusahaan dapat menjalankan usahanya kembali seperti semula.

Pasal 114 Undang-undang tentang Perseroan terbatas menyatakan Perseroan bubar karena :

1. Keputusan RUPS (rapat umum pemegang saham)
2. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran dasar telah berakhir
3. Penetapan Pengadilan

Pasal 117 Undang-undang tentang Perseroan terbatas menyatakan :

1. Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas :
  - a) Permohonan Kejaksaan berdasarkan alasan kuat Perseroan melanggar kepentingan umum 'permohonan 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
  - b) Permohonan kreditur berdasarkan alasan :
    - 1) Perseroan tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit.
    - 2) Harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut, atau.
  - c) Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian perseroan.
2. Dalam penetapan Pengadilan ditetapkan pula penunjukan likuidator

Keadaan debitur yang tidak punya harta penyelesaian pelaksanaan putusan pernyataan pailit. Harta benda seseorang menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya dan pendapatan penjualan harta benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan. Apa yang akan dibagi jika harta benda debitur hanya cukup untuk membayar *fee* dari pada kurator dan bahkan tidak dapat dibayar jika harta benda debitur tidak ada sama sekali. Usaha yang dapat ditempuh oleh kurator untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan menggunakan upaya, yaitu :

Kurator dapat menggunakan Pasal 397 dan Pasal 399 KUH Pidana yang memberikan ancaman hukuman maksimum 7 (tujuh) tahun penjara kepada debitur pailit, apabila melakukan perbuatan :

1. Dengan dusta mengarang atau menyembunyikan keuntungan atau melarikan harta bendanya.
2. Memindahkan suatu barang atau menyembunyikan keuntungannya
3. Menguntungkan salah seorang kreditur pada waktu debitur dipailitkan atau debitur tahu bahwa pailit tidak dapat dicegah lagi.
4. Tidak melaksanakan kewajibannya untuk membuat pembukuan perusahaan menurut Pasal 6 ayat 1 KUHdagang, menyimpan menunjukkan buku sebagaimana diatur dalam Pasal 34, 46, 65, 725, 7/9 KUHPidana

Namun perbuatan debitur pailit yang diatur dalam Pasal-Pasal di atas haruslah dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri.

Jika kurator melaporkan kepada Penyidik tentang perbuatan debitur yang demikian maka upaya kurator tersebut dapat memaksakan debitur untuk melunasi utang-utangnya.

**c) Actio Pauliana (Claw Back)**

Harta benda seseorang merupakan jaminan seluruh utang-utangnya. Akan tetapi berbagai cara dilakukan seseorang untuk menyelamatkan harta bendanya walaupun disadari harta benda itu menjadi jaminan seluruh hutangnya dan perbuatan tersebut akan merugikan kreditur-krediturnya.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Pasal 1341 menentukan bahwa setiap kreditur dapat mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak wajib dilakukan oleh debitur dengan nama apapun juga yang merugikan para kreditur sepanjang dapat dibuktikan bahwa ketika perbuatan itu dilakukan baik debitur maupun pihak dengan atau untuk siapa debitur itu berbuat mengetahui bahwa perbuatan itu merugikan para kreditur. Lembaga perlindungan hak kreditur

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1341 KUHPerdata tersebut dikenal dengan nama *action pauliana*. Dengan perbuatan debitur yang memindah tangankan tau membebani harta bendanya jelas menghambat penyelesaian pelaksanaan putusan kepailitan. Asas cepat, sederhana, dan efektif yang merupakan asas dari Undang-Undang Kepailitan tidak akan tercapai dan ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap lembaga pengadilan khususnya Pengadilan Niaga. Untuk mengantisipasi keadaan yang tidak menguntungkan ini akan lebih baik kiranya kurator menerapkan Pasal 397 dan Pasal 399 KUHPidana terhadap debitur yang melakukan perbuatan tersebut.

Pengadilan Niaga berpendirian, bahwa Pasal 69 (5) UUPK secara tegas mensyaratkan kurator untuk memperoleh ijin Hakim Pengawas terlebih dahulu sebelum menghadap dimuka pengadilan, atau untuk beracara di muka sidang pengadilan “harus” terlebih dahulu mendapat ijin dari Hakim Pengawas. Kata harus dari Pasal 69 (5) UUPK tersebut menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 69 (5) UUPK bersifat *imperative*, artinya ketentuan tersebut tidak boleh disimpangi. Kurator sebelum menghadap dimuka pengadilan atau sebelum beracara dimuka pengadilan harus mendapat ijin dari Hakim Pengawas dan jika tidak dipenuhi, maka permohonan *action pauliana* tersebut tidak memenuhi syarat dan beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Fakta tersebut di atas menunjukkan kurator tidak memahami sepenuhnya ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan perbuatan kurator tersebut akan menghambat penyelesaian pelaksanaan putusan kepailitan dan dapat mengurangi harta pailit karena biaya perkara sudah pasti diambil kurator dari harta pailit.

Sebelum beracara, upaya yang dapat ditempuh oleh kurator adalah menghubungi dan meminta petunjuk dari Hakim Pengawas agar upaya untuk meningkatkan



harta pailit dengan mengajukan gugatan *action pauliana* dapat berhasil dengan baik.

**B. Upaya apa yang perlu dilaksanakan oleh kurator-kurator untuk Mencegah timbulnya hambatan-hambatan**

Upaya yang dapat dilakukan oleh asosiasi kurator Indonesia untuk mengantisipasi masalah tersebut adalah dengan mengusulkan kepada Pemerintah untuk segera mengadakan perjanjian sekurang-kurangnya dengan negara Asean tentang eksekusi putusan pailit yang berlaku secara aregional, agar pelarian modal keluar negeri pada masa yang akan datang dapat dikurangi.

**III. PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

1. Debitur Tidak Kooperatif dan Kurator Kurang Profesional yaitu Ketidakhadiran debitur pailit atau debitur tidak kooperatif akan menghambat penyelesaian pelaksanaan putusan kepailitan terutama kurator kurang profesional dalam usahanya untuk mengetahui letak pembukuan-pembukuan, bukti-bukti tertulis tentang perjanjian yang dilakukan dan letak dari harta-harta pailit sehingga kurator akan terhambat dalam upayanya untuk menyelamatkan atau mengamankan harta pailit sebagaimana amanah dari Pasal 72 UU Kepailitan Pelaksanaan putusan kepailitan memerlukan waktu yang lama dan bahkan ada yang tidak dapat dilaksanakan dengan tuntas dikarenakan adanya hambatan-hambatan yang ditemui pada saat pengurusan dan pemberesan harta pailit berupa debitur tidak mau menghadap sewaktu rapat verifikasi, debitur tidak kooperatif dan tidak mengakui putusan pailit yaitu, dengan melakukan pembayaran-pembayaran sendiri tanpa melalui kurator, harta pailit debitur tidak ada sama sekali, harta pailit debitur ada yang dipinda tangankan sebelum putusan pailit. Jika terjadi *insolvensi* lintas batas juga merupakan penghambat putusan kepailitan. Selain dari pada itu kurator kurang memahami ketentuan-ketentuan dalam UU Kepailitan dan Undang-undang

lainnya seperti HIR, KUHP dan UU Perseroan terbatas.

2. Debitur Pailit yang tidak cukup mempunyai harta pailit atau debitur melarikan diri yaitu Dengan konvensi ini maka putusan pailit yang diputuskan oleh Pengadilan dari suatu negara Uni Eropa dapat dieksekusi di negara anggota Uni Eropa lainnya. Upaya yang dapat dilakukan oleh asosiasi kurator Indonesia untuk mengantisipasi masalah tersebut adalah dengan mengusulkan kepada Pemerintah untuk segera mengadakan perjanjian sekurang-kurangnya dengan negara Asean tentang eksekusi putusan pailit yang berlaku secara aregional, agar pelarian modal keluar negeri pada masa yang akan datang dapat dikurangi.

**B. Saran**

1. Untuk mengatasi hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan Putusan Kepailitan kurator harus memperdalam pengetahuannya tentang Undang-Undang kepailitan dan Undang-Undang lainnya seperti HIR, KUHPidana dan Undang-undang Perseroan terbatas serta mengefektifkan berlakunya Undang-undang kepailitan dan Undang-undang lainnya tersebut.
2. Perlu segera dibuat disamping aturan-aturan yang memberikan pedoman yang mengikat yang harus diikuti oleh Hakim Pengawas, Kurator, debitur dan kreditur dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit sehingga hambatan-hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan putusan pailit dapat diatasi dengan baik juga dibuat aturan-aturan yang mengefektifkan berlakunya pelaksanaan lembaga *gijzeling* dengan menentukan siapa yang menjadi pelaksana *gijzeling*, tarif biaya yang harus dikeluarkan untuk tiap hari *gijzeling* dan kepada siapa yang biaya *gijzeling* dibebankan sehingga putusan pailit dapat dilaksanakn dengan tuntas dan dapat membawa dampak yang positif bagi dunia usaha.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku-Buku**

- Fuady, Munir, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya bakti. Bandung, 1998.
- Hoff, Jerry, *Undang-Undang Kepailitan Indonesia*, Penerjemah Kartini Mulyadi, PT. Tatanusa, jakarta, 2000.
- Patrik, Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Undang-Undang)*, CV. Mandar maju, Bandung, 1994.
- Sjahdeni, Remy Sutan, *Hukum Kepailitan (Memahami faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998)*, Pustaka Utama Graffiti, jakarta, 2002.

**BIODATA**

**NOVALDI**, Lahir di Wakai, 09 November 1990, Alamat Rumah Jalan  
Yosudarso Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +62....., Alamat Email  
[novaldylabolo@yahoo.co.id](mailto:novaldylabolo@yahoo.co.id)

